



PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

		NOMOR SOP	065/33/BPPRD/2022
		TANGGAL PEMBUATAN	1 Agustus 2022
		TANGGAL REVISI	4 Desember 2023
		TANGGAL EFEKTIF	2 Januari 2024
		KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH	
		DISAHKAN OLEH	 NIP. 19670922-199303 1 010
DASAR HUKUM :		NAMA SOP	TEGURAN WAJIB PAJAK
		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.		1	Memahami regulasi Pajak Daerah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan.		2	Memiliki Kemampuan Mengoperasikan komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.			
4. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.			
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.			
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah DAN Retribusi Daerah.			
7. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan			
KETERANGAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak		1	ATK, Komputer
2. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah		2	Blanko SPTPD, SKPD/SKPKB/SKPKBT,STPD dan Data pendukung
3. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		3	Daftar tunggakan pajak, dan WP yang belum menyampaikan SPTPD
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
1. Apabila Surat Teguran tidak dibuat dan disampaikan kepada Wajib Pajak, maka Wajib Pajak melakukan kewajiban membayar pajak		1	Dokumen manual dan data elektronik di Sistem Pajak Daerah

FLOWCHART SOP TEGURAN WAJIB PAJAK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		JFU	Kasubid Pengnahan Pajak	Kepala Bidang Pajak	Kepala BPPRD	Wajib Pajak	Kasubid Pengendalian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun laporan data wajib pajak yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran atau pelaporan							Reklaptulasi DataTunggakan Pajak	60 Menit	Reklaptulasi Tunggakan Pajak	
2	Mengoreksi data dan membuat Surat Teguran Kepada Wajib Pajak							Reklaptulasi Tunggakan Pajak	60 Menit	Draf Surat Teguran	
3	Mengoreksi draf Surat Teguran Tunggakan Pajak Daerah. Jika setuju menyampaikan kepada Kaban. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubid untuk diperbaiki.							draf Surat Teguran	30 Menit	draf Surat Teguran yang sudah dikoreksi	
4	Mengoreksi draf Surat teguran Wajib Pajak. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk di perbaiki							draf Surat Teguran	60 Menit	Surat Teguran	
5	Menyerahkan Surat Teguran Wajib Pajak Ke Kasubid Penagihan Pajak untuk menindaklanjuti.							Surat Teguran	30 Menit	Surat Teguran	
6	Menugaskan JFU untuk menyampaikan Surat Teguran Wajib Pajak							Surat Teguran	30 Menit	Surat Teguran	
7	Menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak							Surat Teguran	1 Hari	Surat Teguran	
8	Menerima tembusan Surat Teguran Wajib Pajak							Surat Teguran	20 Menit	Surat Teguran	
9	Menerima Surat Teguran Wajib Pajak							Surat Teguran	7 Hari	Melakukan Pembayaran	SOP Pembayaran Pajak